

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menyebabkan perubahan ang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai otonomi daerah dengan azas dan sistem desentralisasi (Qodarrochman, 2010).

Dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat guna memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain guna menciptakan persaingan daerah dan mendorong lahirnya inovasi. Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu mengeksplor sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang menentukan dan sebagai perangsang untuk meningkatkan pembangunan sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor

pariwisata berarti akan meningkatkan peranannya dalam penerimaan daerah, dimana pariwisata merupakan salah satu komponen dalam peningkatannya (Salah, 2003). Semakin besarnya PAD maka daerah tersebut akan semakin mandiri yang ditunjukkan oleh ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang berkurang. Tetapi pada kenyataannya, daerah masih diharapkan pada ketergantungan fiscal yang berupa subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat yang dikarenakan terbatasnya PAD. Salah satu cara guna mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan memperhatikan besarnya jumlah PAD yang diperoleh oleh suatu daerah (Nasrun, 2009).

Sebelum era otonomi daerah, pemerintah berharap untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan daerah sendiri, akan tetapi hal itu belum bisa terwujud dikarenakan pada kenyataannya ketergantungan oleh fiscal, subsidi serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat semakin besar karena ketidak mampuan PAD suatu daerah (Mardiasmo, 2002).

Pengembangan sektor pariwisata merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam usaha mengembangkan objek-objek pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan sangat bergantung pada keindahan dan daya tarik objek wisata yang telah dikelola maupun yang tersedia secara alami.

Pembangunan sektor pariwisata menyangkut beberapa aspek didalamnya seperti ekonomi dan politik, secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari suatu proses pembangunan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber

pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan yang termaksud didalam Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataaan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta di dalam menjaga potensi pariwisata alam Indonesia sehingga rasa cinta tanah air dan bisa mempererat persahabatan kerjasama antar bangsa.

Industri pariwisata juga memberikan pendapatan bagi pemerintah melalui pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak akomodasi dan pajak-pajak lain. Industri pariwisata adalah sebuah jenis industri yang memegang peranan penting bagi tujuan pembangunan daerah yang pada umumnya untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan pada khususnya memberikan peluang bagi daerah agar mengelola sumber daya alam yang dimiliki supaya dapat menghasilkan peasukan bagi pemerintah daerah.

Karesidenan surakarta merupakan gabungan dari beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jawa tengah yaitu meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Kota Surakarta. Dimana setiap wilayah yang ada di Karesidenan Surakarta memiliki potensi pariwisata yang cukup baik dan memberikan sumbangan bagi pendapatan daerahnya.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Di Surakarta tahun 2011-2014

Tahun	PAD	PAD Pariwisata
2011	181.096.007	47.676.386
2012	231.672.100	55.056.791
2013	298.400.846	64.767.800
2014	319.612.004	72.877.261
Jumlah	1.030.780.957	240.378.238

sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Dilihat dari tabel 1.1 bahwa pendapatan asli daerah di wilayah Kota Surakarta selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya dengan jumlah sebesar Rp.1.030.780.957; sedangkan sumbangan pendapatan dari sektor pariwisata adalah sebesar Rp. 240.378.238 juta.

Kemudian jumlah kunjungan wisatawan juga berpengaruh didalam penerimaan sektor pariwisata. Kota Surakarta termasuk menjadi salah satu daerah yang menjadi destinasi wisatawan baik wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung di wilayah Karesidenan Surakarta. Berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan di wilayah Kota Surakarta dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Surakarta
Tahun 2011-2015

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Domestik	Mancanegara	
2011	2.489.497	49.791	2.539.288
2012	3.030.840	38.261	3.069.101
2013	3.338.203	36.777	3.743.980
2014	4.187.207	44.936	4.232.143
2015	4.106.239	36.546	4.142.785

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah Karesidenan Surakarta khususnya untuk Kota Surakarta selalu

mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 89.358 jiwa, yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 4.232.143 jiwa berkurang menjadi sebesar 4.142.785 jiwa wisatawan yang berkunjung ke Kota Surakarta.

Menurut Qodarrochman (2010), didalam penelitiannya yang menggunakan variabel jumlah obyek wisata, jumlah jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan, tetapi variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh secara signifikan. Dari keempat variabel tersebut yang pengaruhnya paling dominan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang adalah variabel jumlah obyek wisata. Berbeda dengan penelitian oleh Widiyanto (2013) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata, sedangkan dari pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua penelitian tersebut.

Prioritas utama dalam membangun sistem ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian daya saing melalui sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di latar belakang ini, maka topik dalam penelitian ini adalah

**“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN
ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA DI WILAYAH
KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2011-2015”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan secara spesifik juga membuat pembahasan didalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Sehingga dalam penelitian ini saya hanya menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, jumlah restoran dan rumah makan dan jumlah angkutan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di wilayah Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seberapa optimal dan seberapa pengaruh dari jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, jumlah restoran dan rumah makan serta jumlah angkutan umum terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata, yang merupakan indikator yang dapat digunakan guna mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui PAD yang diterima daerah tersebut. PAD ini bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba perusahaan daerah, penerimaan dinas dan pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun pertanyaan pada penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Apakah Faktor jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, jumlah restoran dan jumlah angkutan umum mempengaruhi penerimaan daerah sektor pariwisata di Karesidenan Surakarta ?

2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Karesidenan Surakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Faktor jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, jumlah restoran dan jumlah angkutan umum mempengaruhi penerimaan daerah sektor pariwisata di Karesidenan Surakarta.
2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Karesidenan Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di wilayah Karesidenan Surakarta pada tahun 2012-2015.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi institusi terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten yang ada di wilayah Karesidenan Surakarta dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

